

STRATEGI KEWARGANEGARAAN DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan (S.I.P.)



Disusul Oleh :

Unknown in newtown

123456789

unknowninnewtown@gmail.com

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN POLITIK (FHSIP)
UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ-UT BOGOR
2023**

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era kemajuan teknologi digital, konsep kewarganegaraan digital menjadi semakin relevan dan penting dalam pembentukan Good and Clean Government. Sebagaimana disampaikan oleh Ribble dan Bayley (2007), kewarganegaraan digital bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan juga norma-norma perilaku yang menjadi pedoman bagi warganegara dalam menghadapi tantangan abad digital. Dalam konteks ini, sembilan elemen kewarganegaraan digital mencakup seluruh aspek kehidupan, memandu individu untuk menggunakan teknologi secara pantas dan bertanggung jawab.

Salah satu aspek utama kewarganegaraan digital, sebagaimana diuraikan oleh Collier (2019), adalah kemampuan berpikir kritis dan membuat pilihan etis terkait konten yang dipublikasikan, dilihat, ditulis, dan dikomunikasikan melalui media digital. Hal ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, membentuk kewarganegaraan digital menjadi suatu kebijakan yang strategis dalam upaya membentuk warga negara yang melek digital atau literat dalam penggunaan teknologi.

Pendekatan pembentukan kewarganegaraan digital dapat diimplementasikan melalui sejumlah jalur, seperti pendidikan di sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh Choi (2016), kewarganegaraan digital dapat diajarkan sebagai etika atau tata cara dalam penggunaan internet yang bersifat etis dan bertanggung jawab. Pendidikan di sekolah memegang peran penting dalam membekali peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam terkait penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga memiliki peran strategis dalam pembentukan kewarganegaraan digital. Seperti yang diungkapkan oleh Choi (2016), PPKn dapat menjadi wahana untuk mendidik literasi digital, yang melibatkan keterampilan teknis berbasis komputer dan internet. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan digital bukan hanya sekadar memahami etika penggunaan internet, tetapi juga menguasai keterampilan teknis yang mendasar dalam menghadapi era digital ini.

Pentingnya literasi digital dalam mendukung kewarganegaraan digital tampak dalam konteks kebijakan publik. Dalam era di mana informasi bersirkulasi dengan cepat melalui berbagai platform digital, kemampuan untuk menyaring, menilai, dan menggunakan informasi dengan bijak menjadi

keterampilan yang sangat penting. Literasi digital bukan hanya tentang bagaimana menggunakan perangkat lunak atau melakukan navigasi di internet, melainkan juga tentang kemampuan mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya, menganalisis informasi, dan berpartisipasi secara efektif dalam ruang digital. Keterampilan teknis dalam literasi digital mencakup pemahaman terhadap hardware dan software, keamanan digital, serta kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai alat digital. Koltay (2011) membenarkan bahwa penekanan pada keterampilan teknis ini esensial dalam membentuk individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Oleh karena itu, integritas literasi digital tidak hanya memengaruhi aspek pribadi, melainkan juga berdampak pada kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam lingkup kewarganegaraan digital, aspek literasi digital juga memainkan peran kunci dalam membentuk individu yang mampu berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam kehidupan politik. Individu yang memiliki literasi digital yang baik dapat lebih efektif dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat, mengakses informasi politik, dan berpartisipasi dalam diskusi online yang konstruktif. Oleh karena itu, literasi digital bukan hanya keterampilan teknis semata, melainkan fondasi untuk pembentukan kewarganegaraan digital yang sehat dan aktif. Selain itu, perkembangan teknologi digital telah memungkinkan adanya perubahan dalam bentuk partisipasi politik masyarakat. Dengan semakin banyaknya platform digital yang menyediakan ruang untuk berpartisipasi, warga negara dapat lebih mudah mengakses informasi politik, mengorganisir kampanye, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kewarganegaraan digital menciptakan kesempatan untuk meningkatkan keterlibatan warga negara dalam proses demokratis, sehingga masyarakat dapat lebih aktif memberikan kontribusi pada pembentukan kebijakan publik. Namun, di tengah potensi positif tersebut, perlu juga diakui bahwa kewarganegaraan digital juga membawa tantangan dan risiko. Perilaku cyberbullying, penyebaran informasi palsu (hoax), dan manipulasi opini publik melalui media digital menjadi ancaman nyata bagi integritas proses demokratis. Oleh karena itu, literasi digital yang komprehensif tidak hanya membekali individu dengan keterampilan teknis, tetapi juga membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk mengenali dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam ruang digital.

Dalam konteks ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan kewarganegaraan digital yang efektif.

Penyediaan kurikulum yang relevan, pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik, serta kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi digital menjadi langkah-langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berhasil berpartisipasi dalam masyarakat digital. Dengan demikian, dalam rangka membangun Good and Clean Government, penguatan kewarganegaraan digital melalui literasi digital menjadi kunci. Hal ini tidak hanya berdampak pada partisipasi politik yang lebih cerdas dan aktif, tetapi juga pada integritas proses demokratis secara keseluruhan. Oleh karena itu, penekanan pada literasi digital sebagai elemen kritis kewarganegaraan digital merupakan langkah yang strategis dalam menciptakan masyarakat yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam era digital ini.

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kewarganegaraan digital dalam konteks membangun Good and Clean Government merupakan aspek penting yang memerlukan pemahaman mendalam dan penerapan strategis. Kajian pustaka pada topik ini mengungkapkan bahwa kewarganegaraan digital melibatkan serangkaian norma perilaku, etika, dan keterampilan teknis yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan digital. Menurut Ribble dan Bayley (2007), konsep ini mencakup sembilan elemen kewarganegaraan digital, yang melibatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab digital, literasi digital, dan etika dalam penggunaan teknologi. Dalam konteks Good and Clean Government, kewarganegaraan digital menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam ranah digital. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fokus utama. Koltay (2011) menekankan bahwa literasi digital, termasuk keterampilan teknis, menjadi kunci dalam membentuk individu yang dapat berpartisipasi secara cerdas dalam era digital. Oleh karena itu, melalui tinjauan literatur yang komprehensif, kajian ini akan menjelajahi peran kewarganegaraan digital dalam membentuk Good and Clean Government, dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci, tantangan, dan peluang yang muncul dalam konteks ini.

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Konsep Good and Clean Government

Dalam ranah manajemen pemerintahan di Indonesia, istilah "good and clean governance" dikenal dengan sebutan "tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih." Sebelum era reformasi, istilah ini belum merambah ke dalam kesadaran masyarakat Indonesia secara luas. Berbagai faktor dapat diidentifikasi sebagai penyebab ketidakpopuleran istilah ini pada masa tersebut, meskipun beberapa di antaranya dianggap kurang relevan untuk dibahas dalam konteks pembahasan ini. Namun, yang patut dicatat adalah bahwa istilah "good and clean government" merupakan terminologi yang relatif baru dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia.

Salah satu poin penting terkait dengan penerimaan istilah ini di Indonesia adalah peran berbagai lembaga pemberi bantuan kepada pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (2007: 21), istilah ini menjadi sorotan dan perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia sebagai dampak dari berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut. Adanya bantuan ini menjadikan tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai konsekuensi yang harus diemban oleh Indonesia sebagai negara penerima bantuan. Dalam konteks ini, perubahan dalam penggunaan istilah ini mencerminkan evolusi pandangan terhadap manajemen pemerintahan di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya tercermin dalam pergeseran terminologi, tetapi juga mencerminkan perubahan lebih dalam dalam paradigma pemerintahan dan penataan kebijakan di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari penerimaan istilah "tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," masyarakat dan pemerintah di Indonesia dihadapkan pada tugas penting untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep ini.

Munculnya istilah ini sebagai fokus utama pembahasan dan kebijakan menunjukkan bahwa Indonesia telah bergerak menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konsep "good and clean governance" menjadi kunci untuk membentuk landasan yang kuat dalam membangun pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perjalanan istilah ini dari bantuan luar menjadi bagian integral dari bahasa pemerintahan Indonesia memberikan gambaran tentang perubahan paradigmatik dalam upaya menciptakan good and clean government.

3.2 Prinsip-Prinsip Good and Clean Government

Penerapan prinsip-prinsip Good and Clean Government (GCG) menjadi landasan utama dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kesembilan prinsip yang diuraikan oleh Lembaga Administrasi Negara (2007) - partisipasi, taat hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi strategis menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk membangun fondasi GCG.

1. Partisipasi

Prinsip partisipasi memainkan peran sentral dalam GCG. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dan terlindungi. Partisipasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- a. Akses informasi publik
- b. Penyampaian aspirasi
- c. Pengawasan kinerja pemerintah

Akses informasi publik merupakan hal yang penting untuk memungkinkan masyarakat untuk memahami kebijakan dan program pemerintah. Masyarakat juga perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki sarana untuk mengawasi kinerja pemerintah untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja secara efektif dan efisien, serta tidak melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

2. Taat Hukum

Taat hukum merupakan prinsip yang penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara adil dan transparan. Pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk hukum tata negara, hukum perundang-undangan, dan hukum adat. Masyarakat juga harus mematuhi hukum yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.

3. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang penting untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah harus membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai berbagai aspek pemerintahan, seperti:

- a. Kebijakan dan program pemerintah

- b. Anggaran pemerintah
- c. Proses pengambilan keputusan

Transparansi juga penting untuk memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

4. Responsif

Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus cepat dan efektif dalam menanggapi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Responsifitas pemerintah dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti:

- a. Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat
- b. Melakukan survei kepuasan masyarakat
- c. Mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik

5. Berorientasi kesepakatan

Pemerintah harus berorientasi kesepakatan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Pemerintah harus melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan, sehingga diperoleh solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

6. Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip yang penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, gender, atau status sosial.

7. Efektif dan efisien

Pemerintah harus efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada. Pemerintah harus menggunakan sumber daya secara tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.

8. Akuntabilitas

Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Pemerintah harus transparan mengenai pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya. Pemerintah juga harus terbuka terhadap pengawasan oleh masyarakat.

9. Visi strategis

Pemerintah harus memiliki visi strategis dalam pembangunan. Pemerintah harus memiliki rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan pembangunan.

3.3 Prinsip-Prinsip Good and Clean Government

Dalam membangun Good and Clean Government, kewarganegaraan digital memegang peran sentral. Faktor-faktor seperti keterampilan, pengetahuan, dan perilaku dalam menggunakan dan mengakses informasi secara online memiliki dampak signifikan, sebagaimana disorot oleh Kim dan Choi (2018: 157). Konsep ini diperdalam oleh Ribble (2011: 16-44), yang mengidentifikasi sembilan komponen kewarganegaraan digital sebagai panduan dalam pemanfaatan teknologi di era digital. Komponen tersebut mencakup akses digital, konsumsi digital, komunikasi digital, literasi digital, etiket digital, undang-undang terkait penggunaan digital, kesehatan digital, hak dan tanggung jawab digital, serta keamanan digital. Brichacek (2014: 3) melengkapinya dengan sembilan aspek penting, mulai dari hak dan akses yang sama untuk semua hingga kesehatan fisik dan psikologis dari teknologi.

Dalam konteks pemerintahan, kewarganegaraan digital berperan dalam mengatur interaksi antara warganegara dan pemerintah di ruang digital. Prinsip-prinsip Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan, menjadi landasan bagi pemanfaatan kewarganegaraan digital (Kim & Choi, 2018: 157). Keberhasilan Good and Clean Government ditentukan oleh seberapa baik kewarganegaraan digital diintegrasikan dalam kebijakan dan pelayanan publik. Penerapan teknologi digital, seperti e-Government, meminimalkan birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan, menghasilkan proses administratif yang dapat diakses secara online, mengurangi waktu dan biaya untuk warga negara.

Pengembangan Good and Clean Government yang berkelanjutan memerlukan integrasi kewarganegaraan digital dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan. Penerapan teknologi dalam membuat kebijakan inklusif dan berbasis bukti menjadi kunci utama. Penggunaan data besar (big data) dan analitik dapat membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Dialog yang lebih luas dan inklusif dengan warga negara melalui platform digital menjadi sarana untuk memastikan suara mereka didengar dan dihargai. Kewarganegaraan digital juga berkontribusi pada pengembangan kapasitas institusi pemerintah dan peningkatan literasi digital di kalangan aparatur pemerintah, faktor penting untuk menjaga keberlanjutan Good and Clean Government. Dengan begitu, kewarganegaraan digital bukan hanya menjadi alat pendukung, melainkan fondasi integral dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di era digital. Kesadaran akan kewarganegaraan digital menjadi kunci bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama membentuk tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam melangkah menuju good and clean government, kewarganegaraan digital muncul sebagai elemen kunci yang tidak dapat diabaikan. Lebih dari sekadar penerapan teknologi, konsep ini merangkum pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi dapat menjadi katalis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam konteks pemerintahan. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan digital tidak dapat dilewatkan, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kemampuan untuk terlibat secara efektif dan bertanggung jawab dalam setiap proses. Penerapan prinsip good governance yang didukung oleh teknologi digital membawa harapan akan pemerintahan yang tidak hanya efisien dan responsif, tetapi juga inklusif. Ini mendorong pemerintah untuk mengambil komitmen penuh dalam memastikan akses informasi dan layanan yang merata bagi semua warga negara.

4.2 Saran

Kunci utama dalam membangun good and clean government terletak pada transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek ini memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipantau, dievaluasi, dan diakui oleh publik. Mereka menjadi pondasi yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mencapai keberlanjutan good and clean government, diperlukan kerja sama yang erat antara warga negara dan pemerintah di dalam ekosistem digital. Melalui dialog yang terbuka dan partisipasi aktif warga negara dalam setiap proses pemerintahan, kita dapat membentuk pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Inilah landasan yang akan memastikan pemerintahan tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi era digital, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam membentuk masa depan pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

MKWU4109: Pendidikan Kewarganegaraan

Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M., Dr. Reno Wikandaru, S.FIL., M.PHIL., Dr. Hastangka, S.FIL.,
M.PHIL. BMP MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan.

Ella Dewi Latifah, S.Pd. (2023): Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Verbena Ayuningsih Purbasari, R. Samidi, Elia Nurindah Sari, Roy Kembar Habibi, Rudi Setiawan
(2020): Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Abad 21.

Muhammad Yusuf, Anisa Ariefiati, M. Kautsar Sophan, Aang Kisnu Darmawan (2023): E-
Government

Agus Dwiyanto (2021): Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik

Irwansyah (2023): Pemberdayaan Digital: Pengetahuan dan Kebijakan

Muh. Arief Efendi (2009): The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi

Abd Kholik (2014): Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman 2 (1), 97-134; Good Governance
dalam Membangun Masa Depan Indonesia

Yu Keping (2018): Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences 11, 1-8; Governance and
Good Governance: A New Framework for Political Analysis